



# Buletin Parlementaria



**3 Gotong-Royong  
Jadi Pedoman  
DPR**



**4 Kolaborasi Apik  
Seluruh  
Anggota Dewan**



**Sahkan RUU  
Pelayaran Jadi  
Undang-Undang**



**Pansus  
Angket Haji  
Dorong  
Revisi UU Haji**



## DPR RI Terus Sempurnakan Diri

Nomor 1314/III/X/2024 Oktober 2024



9 772614 339005



# DPR RI Terus Sempurnakan Diri



Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI berfoto bersama di Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019 - 2024 terakhir.

FOTO: ARIEF/PDT

**D**i akhir masa jabatannya, Ketua DPR RI Puan Maharani atas nama seluruh Anggota DPR dan Pimpinan DPR periode 2019-2024 mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat Indonesia atas kepercayaannya kepada kami. Walaupun kami tidak sempurna, kami sudah berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan," ungkapnya usai memimpin Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Mewakili DPR periode 2019-2024, Puan mengungkapkan permohonan maaf atas segala kekurangan selama 5 (lima) tahun mengemban amanah di DPR. Ia ungkapkan ini saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Rapat Paripurna ini merupakan momen rapat terakhir bagi DPR periode 2019-2024.

"Apa yang telah kita kerjakan pada masa sidang ini dan selama 5 tahun masa kerja merupakan kerja kolektif dari seluruh anggota DPR RI, Komisi, Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya," ujar Puan.

Ia juga menyampaikan momen ini akan menjadi akhir masa bakti

anggota DPR periode 2019-2024 yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun. Ia menyadari bahwa tidak semua dapat dilaksanakan dengan sempurna. "DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat," jelasnya.

Tidak berhenti, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengucapkan apresiasi kepada seluruh para mitra kerja DPR untuk kerja sama dalam membangun bangsa. Ia juga menyampaikan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama kerja bersama pada periode DPR ini. **aha**



# Gotong-Royong Jadi Pedoman DPR



FOTO: FARHAN/HAN

**Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat Konferensi Pers bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).**

**T**ak terasa, DPR RI periode 2019-2024 memasuki periode terakhirnya yang tiba pada Senin, 30 September 2024 ini. Dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa selama 5 tahun bersama Pimpinan DPR RI lainnya telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik melewati kondisi global yang tidak baik-baik saja, namun sampai akhirnya pada hari ini semuanya bisa berjalan baik dengan semangat gotong-royong dan kesatuan bersama.

“Kami Pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI dan Fraksi-Fraksi dari awal terpilih hingga saat ini tanggal 30 September 2024 semuanya

kompak, solid, menjalankan tugas konstitusional. Kalau pun kemudian ada dinamika, semuanya itu bisa kami selesaikan secara baik, secara musyawarah mufakat,” ujar Puan saat konferensi pers bersama para Wakil Ketua DPR RI, Senin (30/9).

Puan menekankan kekompakan dan soliditas antara Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota serta seluruh fraksi yang ada, meskipun terdapat dinamika politik di dalamnya. Tak hanya itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut juga menerangkan capaian DPR RI yang sudah berhasil menyelesaikan fungsi anggaran dalam masa transisi menuju ke pemerintahan baru.

— pun,arq/rdn

Scan QR untuk berita selengkapannya



#### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

#### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

#### WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

#### PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

#### PIMPINAN REDAKSI

M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

#### WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

#### REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

#### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

#### SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

#### ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom,

Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos,

Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom,

Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Saveria Sa'diyah, S.I.Kom,

Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi

Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,

Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,

Balggs Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,

Yasmin Nabila

#### FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

#### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

#### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

#### PENERBITAN

##### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

##### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

##### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

##### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E,

Indah Ekawati, S.I.Kom.

##### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

##### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

##### ADMINISTRASI

##### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Berfungsi Optimal Awasi Jalannya Pemerintahan



FOTO: ARIEF/HAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus, dalam foto bersama usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (30/9/2024).

**W**akil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus berharap 3 fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap eksekutif dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang optimal. Ia menegaskan, semua kerja DPR harus mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Lodewijk juga memohon maaf apabila selama lima tahun terakhir, DPR periode 2019-2024 masih memiliki kekurangan selama menjalankan tugas.

Ia pun berharap agar kerja DPR terus dikawal, termasuk oleh media yang memiliki fungsi kontrol.

“Kita sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk bagaimana mesosialisasikan apa yang kita teriakkan terima kasih,” ungkap Lodewijk usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (30/9).

Sebelumnya pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5 persen. Sementara pada Oktober 2022, menurut lembaga yang sama, citra DPR ada di angka 44,4

persen.

Kemudian hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen. Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan angka peningkatan citra DPR itu mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama. Berdasarkan data tersebut, artinya terdapat tren positif apresiasi masyarakat kepada DPR dari tahun ke tahun. **aha**



# Kolaborasi Apik Seluruh Anggota Dewan



FOTO: FAISAL/HAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (30/9/2024).

**W**akil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus mengatakan selama lima tahun, seluruh anggota DPR periode 2019-2024 telah melakukan kolaborasi yang sangat bagus. Berkat kolaborasi apik itu, citra DPR RI pun meningkat.

“Kami secara kolektif dan kolegial sudah bekerja sama selama 5 tahun. *Alhamdulillah*, bukti hari ini menyatakan bahwa kolaborasi kita sangat bagus,” ujar Lodewijk usai Rapat Paripurna terakhir

DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (30/9).

“*Nah*, tolok ukur yang paling gampang yaitu Citra DPR dari lembaga-lembaga pemerintah di survei. Kita sudah nomor urut 6 atau diberi poin 62,12%, sangat tinggi,” imbuhnya.

Menurut hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya kenaikan citra DPR di mana pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5

persen.

Kendati demikian, memang terjadi pasang surut pada citra DPR sejalan dengan dinamika politik yang terjadi. “Dinamika politik sangat kental apalagi akhir kemarin kita ada pemilu dan Pilkada yang segera kita laksanakan, tetapi bisa terlewat ini tidak lepas dari bantuan rekan-rekan media,” jelas Lodewijk.

Meski bulan September ini terjadi penurunan, namun citra DPR mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dari hasil Litbang Kompas Juni lalu, citra positif DPR naik sebesar 12,1% dibanding tahun 2023. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Hasilkan 225 UU dan Dengar Tiap Kritik



FOTO: JAKA/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**A**nggota DPR RI periode 2019-2024 telah paripurna menjalankan tugas dengan sejumlah hasil kerja yang berhasil dituntaskan. Hal itu mulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun berbicara tentang *political will* anggota dewan dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Puan menyampaikan hasil kinerja DPR selama 5 tahun. Rapat Paripurna ini menjadi rapat terakhir DPR periode 2019-2024.

Menutup masa bakti periode 2019-2024, menurut Puan, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kementerian Negara, UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Dengan demikian, selama periode 2019-2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 Rancangan Undang-Undang (RUU)," kata Puan Maharani dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 yang digelar di Gedung Nusantara

II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Adapun 225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya. Sebanyak 225 UU tersebut termasuk sejumlah UU yang disahkan DPR hari ini.

Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU, dan tahun 2020 juga 13 UU di mana 2 di antaranya merupakan *carry over* dari periode DPR sebelumnya.  **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pandemi-Pemilu Jadi Tantangan DPR 2019-2024



FOTO: DSP/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**K**etua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna terakhir DPR Periode 2019-2024. Puan pun menyinggung berbagai kesulitan yang dihadapi anggota DPR RI periode ini, mulai dari Pandemi Covid-19 hingga dinamika Pemilu 2024 lalu.

Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menjadi rapat terakhir DPR periode 2019-2024. Rapat paripurna ini sekaligus menutup Masa Kerja Anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang telah dilakukan selama 5 tahun.

Adapun Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 digelar di

Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

Rapat Paripurna terakhir ini diawali dengan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Setelah itu dilanjutkan pembacaan 4 laporan atau hasil pembahasan dari Panitia Angket dan Tim Pengawas diikuti dengan pengambilan keputusan. Setelahnya, agenda dilanjutkan dengan Pidato penutup masa sidang DPR oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Tanpa terasa, masa bakti selama lima tahun telah kita jalani sejak tanggal

1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada pada hari terakhir," ujar Puan mengawali pidatonya dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 kali ini.

"Selama bekerja pada periode 2019-2024, kita, bangsa dan negara Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan kemudian mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi anggota DPR Periode 2019-2024. Antara lain pandemi Covid-19 yang berdampak pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, serta konflik geopolitik regional yang berdampak pada krisis pangan dan energi global, termasuk Indonesia. **— bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Dukung APBN Jadi Tulang Punggung Negara



FOTO: DEWI/HAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**K**etua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR Periode 2019-2024 telah menyelesaikan 2 (dua) Undang-Undang, yaitu UU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023 dan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Menurut pandangannya, APBN telah menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2019-2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung

Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). “Undang-Undang APBN Ta-hun Anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan sehingga dirancang untuk dapat menciptakan perekonomian makro yang kondusif serta memberikan ruang bagi kebijakan dan program kerja dari Pemerintahan yang baru,” tutur Puan.

Ia menambahkan, APBN telah menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2019-2024. Selain itu jelasnya, APBN telah menopang pembangunan nasional, serta memberikan perlindungan sosial bagi rakyat, bahkan dalam

menghadapi Pandemi Covid-19, gejolak ekonomi sosial, ekonomi global, krisis pangan dan energi.

Menurutnya, APBN mendatang perlu mempertajam kualitas belanja negara dalam menyelesaikan masalah struktural. Kemudian, disampaikan Puan, berkualitas dalam memberikan perlindungan sosial dan pemerataan pembangunan.

“APBN berfungsi menjadi penopang, stimulus, serta katalisator dalam pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Belanja APBN yang semakin berkualitas akan dapat mendekatkan kita dalam mencapai Indonesia emas 2045,” ungkapnya. 



# RUU Pengawasan Obat dan Makanan Tak Dilanjutkan



FOTO: RUMI/HAN

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh terkait keputusan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).

**D**PR RI dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Senin (30/9), menyetujui keputusan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Keputusan ini diambil setelah laporan Komisi IX DPR RI disampaikan dan disetujui oleh para anggota dewan.

“Kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI mengenai kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan

RUU POM ini dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang segera direspons dengan seruan “setuju” dari para anggota DPR yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan laporan resmi Komisi IX terkait proses pembahasan RUU tersebut. RUU Pengawasan Obat dan Makanan awalnya merupakan inisiatif DPR dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. Bahkan, pada 28 Maret 2024, RUU ini sudah disepakati dalam Rapat Paripurna dan telah dikirim ke Presiden untuk dibahas lebih lanjut.

Presiden kemudian merespons melalui surat tertanggal 29 Mei 2024, yang menugaskan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

Namun, setelah melalui beberapa rapat kerja dan diskusi yang intensif, termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja), disepakati bahwa pembahasan RUU ini tidak dilanjutkan. Berdasarkan hasil rapat antara DPR dan pemerintah pada 17 September 2024, Komisi IX dan perwakilan pemerintah sepakat untuk tidak melanjutkan RUU ini. **rmm/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sahkan RUU Pelayaran Jadi Undang-Undang



FOTO: JAKA/HAN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat menyerahkan laporan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, antara Komisi V DPR RI dan Pemerintah, telah digelar sejak 20 September 2024. Dalam rangkaian Rapat Kerja tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 305 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Setelah itu, untkapnya, pembahasan

RUU Pelayaran tersebut dilanjutkan dengan Rapat Pembahasan Tingkat Panja dan Tim Perumus secara intensif, yang menghasilkan rumusan yang telah disepakati bersama Pemerintah.

“Pada Pembicaraan Tingkat I dalam forum Rapat Kerja, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, semua fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui RUU ini untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam forum Paripurna,” ujar Ridwan Bae.

“RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, merupakan jawaban atas perkembangan kebutuhan hukum

dalam bidang Pelayaran, yang belum diakomodasi oleh UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selama kurang waktu lebih dari satu dekade,” lanjutnya menerangkan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan dalam RUU ini terdapat beberapa perubahan dan sinkronisasi yaitu perubahan pasal sebanyak 44 pasal, perumusan materi pasal baru sebanyak 18 pasal, penghapusan 3 pasal dan penyesuaian pada beberapa angka dalam ketentuan umum, perubahan judul bab atau bagian sebanyak 6 judul, serta perubahan penjelasan pasal sebanyak 4 pasal. **pun/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Pansus Angket Haji Dorong Revisi UU Haji



FOTO: JAKA/HAN

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat menyampaikan laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji pada Rapat Paripurna, di Gedung Parlemen, Senin (30/9/2024).

Pembentukan Panitia Angket Haji DPR RI didorong oleh adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip *good governance*, akuntabilitas dan transparansi.

Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan

dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator. Tak luput pula operator Kementerian Agama, penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, jemaah haji, serta melakukan kunjungan ke lapangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang haji, dimana adanya penyelewengan kuota haji yang tidak sesuai. Siskohat dan Siskopatuh tidak bisa terjamin keamanannya karena tidak adanya audit secara berkala," kata Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid dalam agenda Rapat Paripurna, di Gedung Parlemen, Senin (30/9).

Ia mengatakan Pansus merekomendasikan adanya revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang haji dan UU No 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertauran yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik. **tn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Timwas PPMI Paparkan 12 Butir Kesimpulan



FOTO: DEP/ HAN

Anggota Timwas PPMI Nihayatul Wafiroh saat membacakan laporan timwas pada sidang paripurna terakhir DPR RI Periode 2024-2029 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**T**im Pengawas (Timwas) DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyampaikan 12 butir kesimpulan dari seluruh seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Timwas PPMI. Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Timwas PPMI Nihayatul Wafiroh menegaskan dalam sidang paripurna terakhir DPR RI Periode 2024-2029 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

“Undang-Undang PPMI telah secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI, mulai dari pemerintah

pusat hingga ke tingkat desa. Namun pada tataran implementasi pemerintah belum optimal dalam menjalankan UU PPMI oleh karena itu koordinasi dan kolaborasi antar 29 Kementerian/ Lembaga yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan PMI harus terus dioptimalkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ninih, begitu ia biasa disapa, mengungkapkan bahwa Timwas masih menemukan berbagai permasalahan sejak calon PMI belum diberangkatkan. Termasuk masalah pemberangkatan yang nonprosedural, masalah selama PMI bekerja di negara penempatan, dan masalah ketika PMI kembali ke tanah air.

Selain itu ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI antara lain tugas dan tanggung jawab pemerintah yang belum optimal PMI yang belum memiliki sertifikasi, belum terbentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI, belum adanya lembaga khusus yang melakukan pelatihan bagi Calon PMI, verifikasi *job order* belum optimal, pelayanan PMI yang masih rumit, penanganan permasalahan PMI yang belum optimal, dan data PMI yang belum terintegrasi. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus segera diselesaikan agar PMI terlindungi dengan baik.

 **ayu/rdn**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Rekomendasi Timwas Perlindungan PMI



FOTO: JAKA/HAN

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat membacakan laporan Timwas dalam sidang paripurna DPR RI di di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**D**ari temuan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas (Timwas) DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Timwas merekomendasikan beberapa hal. Diantaranya Pemerintah perlu melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi PMI dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian lembaga.

“Selain itu, Kementerian Koperasi dan Perekonomian perlu segera mempercepat pengesahan rancangan peraturan presiden tentang penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI,” ujar Anggota Timwas

DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Nihayatul Wafiroh di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ditambahkannya, setiap Kementerian/lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI perlu melakukan *update* data dan situasi terkini, terkait semua persoalan yang dihadapi dalam penempatan dan perlindungan PMI. Terutama persoalan yang paling sering terjadi permasalahan yang terkait dengan Purna PMI pemetaan provinsi kabupaten kota dengan permasalahan terbanyak dan data CPMI yang gagal berangkat

Politisi Fraksi PKB ini juga merekomendasikan bahwa setiap

Kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI, perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI. Penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan baik koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait lainnya.

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan mekanisme yang lebih efisien terkait penanganan kasus-kasus PMI yang bermasalah, serta pelibatan lebih besar dari pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perlindungan. **ayu/aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# DPR 2019-2024 Solid, Periode Selanjutnya Diharapkan Juga



FOTO: ARIEF/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**K**etua DPR RI Puan Maharani memuji kesolidan anggota DPR periode 2019-2024 yang menutup masa baktinya hari ini. Ia pun berharap anggota DPR periode selanjutnya melanjutkan kekompakan tersebut agar lembaga legislatif semakin maksimal bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"DPR RI 2019-2024, tanggal 30 September 2024 ini sudah menyelesaikan tugas selama 5 tahun di tengah kondisi global yang pada waktu itu tidak baik-baik saja sampai akhirnya Alhamdulillah hari ini semuanya bisa

berjalan dengan baik," kata Puan.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Menurut Puan, kekompakan dalam bekerja yang ditunjukkan Anggota DPR periode 2019-2024 dapat memaksimalkan fungsi legislatif.

"Dengan semangat gotongroyong, kebersamaan, dan kesatuan bersama kami pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI dan fraksi-fraksi dari awal semuanya kompak, solid, menjalankan tugas konstitusional,"

tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menegaskan, DPR periode 2019-2024 sudah melakukan kerja-kerja secara maksimal. Ia menyatakan, fungsi legislasi DPR telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Kita sudah melaksanakannya itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita berusaha selama 5 tahun ini, namun mungkin belum sempurna. Tentu saja kami juga tetap menerima kritik dan otokritik dalam membangun bangsa ke depan untuk bisa menyempurnakan proses-proses legislasi," papar Puan. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# UU TPKS dan UU KIA: Komitmen Perlindungan Masyarakat

**D**PR RI periode 2019-2024 berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah lebih dari 10 tahun diperjuangkan. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia yang selama ini dianggap sebagai fenomena gunung es.

UU TPKS mendapat respons positif dari masyarakat karena tidak hanya menekankan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius pada perlindungan dan pemulihan korban. UU ini mengatur hak korban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk tata cara pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy Aditya, menyoroti pentingnya aturan turunan dari UU ini agar implementasinya dapat berjalan lebih baik. “UU TPKS sampai



FOTO: DEP/ AHA

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menerima audiensi masyarakat.

hari ini turunannya belum ada. Kita punya *responsibility*, maka kemudian kolektif obligasi itu yang penting,” ujar Willy dalam rilis persnya usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Selain UU TPKS, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) sebagai inisiatif DPR. UU ini bertujuan mengatasi masalah kematian ibu dan bayi serta gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Indonesia. UU KIA juga mencakup hak ibu pekerja, termasuk penambahan cuti melahirkan, sebagai langkah memperkuat kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tantangan Penganggaran Selama Pandemi



FOTO: DEP/AHA

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

**D**PR RI periode 2019-2024 menghadapi tantangan berat dalam menjalankan fungsi penganggaran selama pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan pelemahan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor dan memaksa pemerintah bersama DPR melakukan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

“Pada periode 2019-2024 ini terjadi krisis luar biasa, yaitu pandemi Covid-19. Ini sangat berat, dan kita harus menghargai sikap kenegarawanan

teman-teman di DPR yang saling memahami pentingnya menangani krisis dengan cepat dan tanggap,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, usai Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Ia menjelaskan bahwa pada awal pandemi, DPR menyetujui langkah-langkah *refocusing* dan realokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2020. Ini dilakukan dua kali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dan Nomor 72 Tahun 2020, yang

memungkinkan pemerintah mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi.

“Pandemi Covid-19 merupakan krisis luar biasa yang harus dihadapi dengan langkah kebijakan *extraordinary* namun tetap akuntabel,” ujar Cucun.

Langkah ini kemudian diperkuat dengan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa guna menanggulangi dampak pandemi.

 aha

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Omnibus Law Kesehatan: Reformasi Sektor Kesehatan



FOTO: MUNICHEN/HAN

Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

**D**PR RI periode 2019-2024 dianggap berhasil menciptakan reformasi sektor kesehatan nasional dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini disusun melalui metode *omnibus law*, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi sektor kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam sambutannya di Rapat Paripurna terakhir DPR, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa *omnibus law* kesehatan adalah bentuk transformasi dalam legislasi yang bertujuan untuk memperbaiki regulasi,

sehingga sistem kesehatan nasional dapat dikelola dengan lebih baik.

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode ini, DPR RI telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, yaitu antara lain pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan metode *omnibus law*; suatu pembentukan Undang-Undang yang terintegrasi dengan perubahan dari berbagai Undang-Undang lain,” kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

“*Omnibus Law* tentang Kesehatan memberikan landasan hukum bagi pemerataan fasilitas kesehatan, perizinan dan registrasi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi kesehatan,” jelasnya lagi.

Pengesahan UU ini diharapkan dapat memperkuat upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, dan paliatif dalam layanan kesehatan. Selain itu, UU ini juga mengatur penggunaan teknologi kesehatan dan sistem informasi yang lebih modern dalam manajemen kesehatan nasional. Langkah strategis ini menjadi pondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. **aha**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Ratifikasi Kerja Sama Bidang Pertahanan Jadi UU



FOTO: JAKA/HAN

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid terkait 5 RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2023).

**K**etua DPR RI Puan Maharani mengesahkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kerja sama pertahanan Indonesia dengan lima negara menjadi Undang-Undang. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 yang merupakan sidang paripurna terakhir keanggotaan DPR periode 2019-2024.

Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan pertanyaannya kepada seluruh anggota dewan. "Apakah 5 RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan sebagaimana yang telah kami Sebutkan

di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan yang kemudian diikuti dengan seruan setuju dari para anggota DPR yang hadir di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2023).

1. UU tentang Pengesahan Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.
2. UU tentang Pengesahan Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Bidang Pertahanan.
3. UU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. UU tentang Pengesahan Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
5. UU tentang Pengesahan Perseutujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.



# UU Paten Resmi Disetujui



FOTO: JAKA/HAN

**Ketua Panitia Khusus RUU Paten Wihadi Wiyanto saat menyerahkan Laporan Panitia Khusus kepada Ketua DPR RI Puah Maharani, mengenai hasil pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten di Rapat Paripurna.**

**D**PR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten. Persetujuan ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPR RI, Senin (30/9). Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari anggota DPR RI dari berbagai latar alat kelengkapan dewan.

Pada Rapat paripurna terakhir di periode 2019-2024 tersebut, Ketua Panitia Khusus RUU Paten Wihadi Wiyanto menyampaikan

bahwa UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali, termasuk melalui UU Cipta Kerja. Lebih lanjut dijelaskan UU Nomor 13 Tahun 2016 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan kebutuhan hukum baik nasional maupun internasional sehingga perlu diubah dan disempurnakan.

“Perubahan dilakukan terhadap 48 pasal yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Beberapa perubahan substansi atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang penting untuk disampaikan dalam forum Rapat Paripurna yang

berbahagia ini,” ujar Wihadi menyampaikan Laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten di depan peserta Rapat Paripurna DPR RI kali ini.

Pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2026 tentang Paten telah dilakukan pada 23 September 2024 yang lalu. Adapun tiga hal penting yang menjadi titik berat perubahan UU Paten antara lain; mendorong inovasi nasional, mengharmoniskan dengan ketentuan paten internasional dan meningkatkan pelayanan paten. **uc/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Gagas Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu

**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggagas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan asosiasi ini bertujuan agar bahasa Indonesia diakui dan digunakan dalam setiap forum parlemen dunia, terutama di ASEAN.

"Kami mendeklarasikan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Gagasan ini adalah bagaimana bahasa Indonesia dipakai di berbagai forum parlemen dunia, terutama di ASEAN dulu," kata Fadli di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/9).

Fadli mengatakan gagasan ini sudah dimulai sejak 2021 lalu dan sudah banyak negara, terutama di ASEAN, yang telah menyetujui keberadaan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu.

"Jadi Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu ini sebenarnya



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat acara pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/9/2024).



**KAMI MENDEKLARASIKAN ASOSIASI PARLEMEN BERBAHASA INDONESIA-MELAYU. GAGASAN INI ADALAH BAGAIMANA BAHASA INDONESIA DIPAKAI DI BERBAGAI FORUM PARLEMEN DUNIA, TERUTAMA DI ASEAN DULU.**

**Fadli Zon**

Ketua BKSAP DPR RI



bukan proses baru, kita sudah memulai ini sejak 2021 lalu. Gagasan ini adalah bagaimana bahasa Indonesia dipakai di berbagai forum parlemen dunia, terutama di ASEAN dulu. Karena yang berbahasa Indonesia-Melayu ini kurang lebih 300 juta atau 320 juta orang," ucapnya.

"Kita bertemu negara negara yang mayoritas berbahasa Melayu, seperti Ketua Parlemen Malaysia dan mereka sangat mendukung Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Kemudian kami bertemu dengan ketua parlemen Brunei, Timor Leste, Thailand. Jadi setidaknya ada beberapa ketua parlemen yang sangat mendukung berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu," kata Politisi Fraksi P-Gerindra ini. **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Di Hadapan Para Dubes, Sampaikan Capaian Kinerja

Badan Kerjasama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Periode 2019 – 2024

## CATATAN KINERJA, PUBLIKASI DAN LEGACY



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Senin (30/9/2024).

FOTO: WILGA/HAN

**D**i hadapan para duta besar (dubes) dari berbagai negara, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan berbagai capaian dan kinerja BKSAP DPR RI selama masa jabatan 2019-2024. Berbagai capaian kinerja ini kemudian dirangkum dalam empat buku yang diterbitkan oleh BKSAP, yang juga kata Fadli, hal tersebut merupakan sebuah pertanggungjawabannya pada publik.

“Jadi ini adalah sekelumit bagian dari

apa yang dilakukan selama lima tahun, salah satu bentuk dari akuntabilitas BKSAP kepada publik, kepada masyarakat,” kata Fadli di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Senin (30/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun berpesan pada pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang akan datang akan pentingnya peran diplomasi parlemen.

“Pesan kedepan, kita berharap diplomasi bukan hanya tugas dari pemerintah dalam hal ini, tapi juga tugas parlemen, tugas warga negara, tugas masyarakat secara umum, demi kepentingan

nasional. Diplomasi parlemen tentu saja menjadi sangat penting karena di parlemen ini juga merupakan *decision maker*, pembuat undang-undang, *budget*, dan pengawas pemerintah,” kata Fadli.

Legislator Dapil Jawa Barat V ini juga menjelaskan bahwa *platform* parlemen diplomasi sudah ada hampir di semua *level* parlemen. Dan Indonesia, kata Fadli, harus dapat memanfaatkan berbagai forum tersebut untuk politik internasional Indonesia.

**we/rdn**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# RS Hermina Depok Berpelayanan Siap



Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso, dalam foto bersama usai memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Hermina Depok, Jawa Barat (30/9/2024).

FOTO: ESTU/HAN

**K**etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso, menyoroti proses pendataan pada salah satu Rumah Sakit (RS) Provider PT. Asuransi Jasindo yaitu RS Hermina Depok, Jawa Barat (30/9). Menurutnya masih ada keluhan pada proses pendataan di awal registrasi, baik dalam pelayanan anggota maupun masyarakat.

“Sempat ada kendala ketika salah seorang anggota ingin berobat, dimana data yang ada di Rumah Sakit tidak sesuai dengan yang seharusnya, Seperti kelas dan pelayanan yang diberikan. Namun,

beberapa kali juga terlihat masyarakat masih harus mengantri untuk mengurus pendataan ini,” jelas Politisi Partai Demokrat ini ketika diwawancara pada kunjungan kerja BURT.

Menurutnya Rumah Sakit Provider PT. Asuransi Jasindo harus terus berkoordinasi dan memperbaharui data yang ada dengan pusat. Agar tidak terjadi lagi kesalahan data pada Anggota. Terlebih lagi memasuki masa periode baru yang akan berlangsung, sehingga data anggota lama dan anggota baru agar tetap bisa terbaharui.

Solusi lainnya yang dihadirkan oleh RS Hermina Depok untuk masyarakat

adalah adanya aplikasi RS Hermina. Aplikasi ini bisa membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Dimana masyarakat bisa mendaftar melalui rumah masing-masing dan sudah terhubung dengan sistem di rumah sakit.

Aplikasi ini yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam aplikasi ini juga sudah ada tombol emergensi untuk pasien dengan kondisi darurat. Meski begitu Agung tetap mengharapkan RS Hermina terus berkembang dan melengkapi fasilitas yang ada. **stu/aha**



# Fasilitasi Gagasan Pembentukan Kaukus Muda DPR



FOTO: DOK/IAN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat Penutupan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

**S**ekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan pihaknya siap untuk memfasilitasi gagasan pembentukan Kaukus Muda DPR RI di periode baru atau 2024-2029 mendatang. Hal itu Indra sampaikan dalam merespons banyaknya permintaan dari Anggota DPR Terpilih selama kegiatan pembekalan Lemhannas RI yang berlangsung selama sembilan hari terakhir.

Semangat untuk memfasilitasi adanya Kaukus Muda ini sebagaimana juga dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam mengakomodir kegiatan kaukus lainnya

yang sudah berdiri di DPR, seperti Kaukus Perempuan.

“Sebenarnya, hal itu bisa kami fasilitasi. Ini (tua atau muda) bukan soal usia. Kami bisa fasilitasi. Artinya bagaimana kedepan kaukus muda berkiprah, silakan Bapak/Ibu memperkuat gagasan itu. Silakan jika yang ingin perkuat gagasan Kaukus Muda kita fasilitasi,” jelas Indra pada Penutupan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Minggu (29/9).

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR Terpilih Periode 2024—2029 dilakukan di Jakarta dan

Bogor selama 8 hari, mulai 21 hingga 29 September 2024.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 271 orang, terdiri atas calon anggota DPR dan DPD RI terpilih. Bagi anggota dewan yang sudah pernah ikut, tidak diwajibkan untuk ikut kembali.

Total peserta terbagi dalam Angkatan I dan II masing-masing 92 orang, serta Angkatan III 89 peserta. Dalam momen penutupan tersebut, seluruh calon anggota DPR RI pun mengucapkan sumpah komitmen bersama, baik Angkatan I, Angkatan II, dan Angkatan III. rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari dan Tim Komisi VII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (27/9/2024).**

FOTO : CHASBI/HAN



Scan QR untuk berita selengkapnya

